

PENGADILAN PRD. Dinyatakan sebagai organisasi terlarang.

ANDI ARIEF, DI MANA K A

ANDA MENGENAL ANDI ARIEF? Ketika Partai Rakyat Demokratik (PRD) menjadi berita, yakni setelah meletus Peristiwa 27 Juli 1996, nama ini disebut-sebut dalam berbagai tulisan tentang PRD. Ia disebut-sebut sebagai Ketua Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), salah satu organ PRD. Sementara itu, sejumlah pengurus PRD, antara lain ketua umumnya, Budiman Sudjatmiko, yang diburu karena dituduh menjadi penggerak Peristiwa 27 Juli itu, akhirnya tertangkap di tempat persembunyiannya, di rumah Benny Sumardi, kakak kandung seorang aktivis kemanusiaan, Romo Sandyawan Sumardi.

Penangkapan berbuntut pengadilan, dan akhirnya oleh pemerintah PRD dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Bahkan, pemilik rumah tempatnya "sembunyi" dan Romo Sandyawan yang dituduh "melindungi" mereka ikut diadili. Tapi, berbeda dengan sejumlah aktivis PRD yang dijatuhi hukuman satu sampai 13 tahun, Benny dan Romo Sandyawan dua pekan lalu dibebaskan dari tuntutan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi (*lihat* D&R 28 Maret).

Rupanya, tetap dilakukan pengejaran terhadap sejumlah nama yang terkait dengan PRD. Dugaan inilah yang muncul atas "diculik"nya Andi Arief oleh sekelompok orang tak dikenal, Sabtu, 28 Maret pekan lalu, di Bandarlampung.

Tak Termasuk Buron

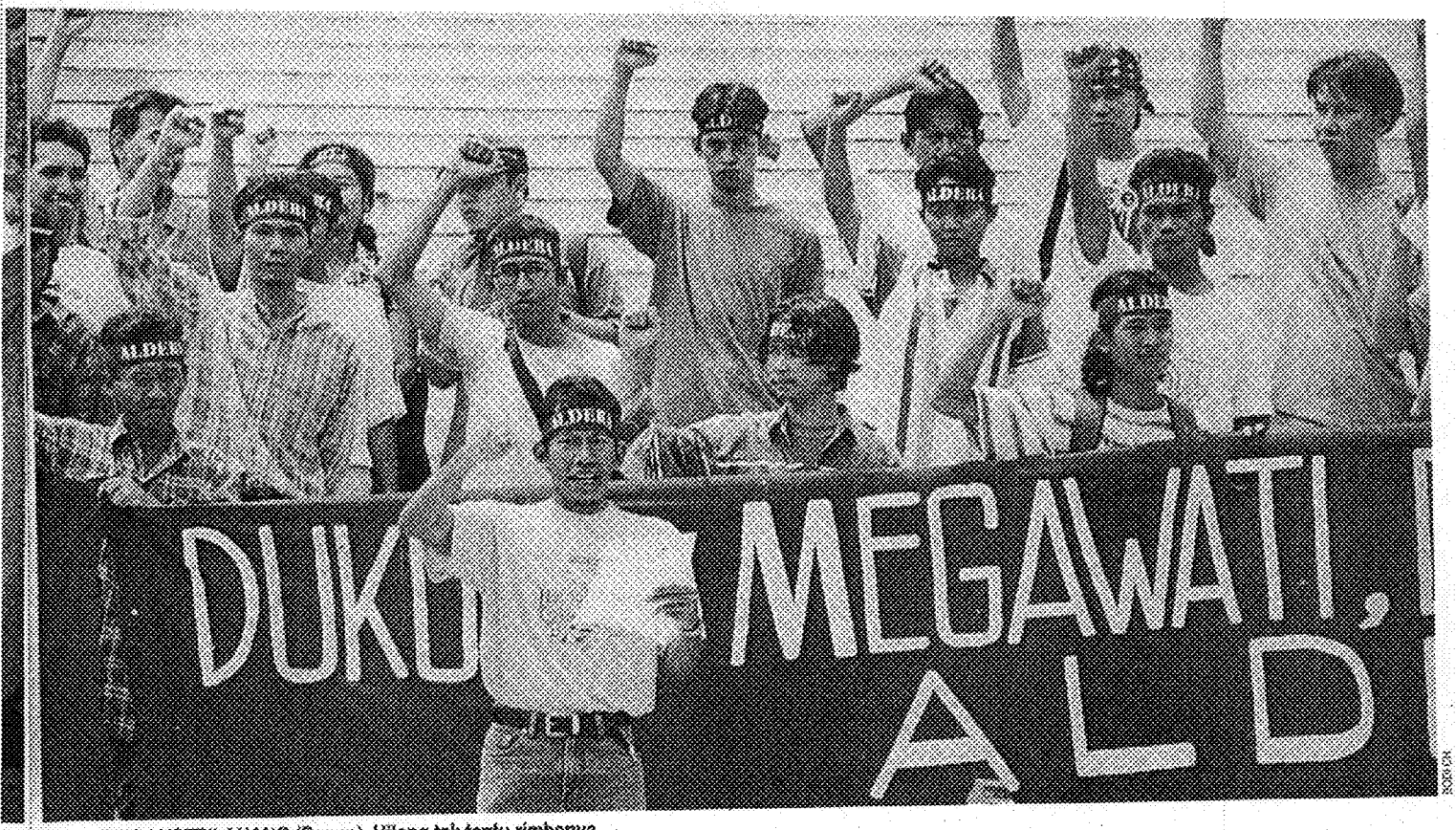
Disebut sebagai "diculik" oleh sekelompok orang tak dikenal, karena orang-orang yang datang ke ruko tersebut sama sekali tidak menunjukkan surat resmi penangkapan, misalnya. Bahkan, pihak aparat keamanan, baik tentara maupun polisi di Bandarlampung, menyangkal kalau pihaknya menangkap pemuda yang bernama Andi Arief. Danrem 043 Garuda Hitam, Kol. Inf. Cornel Simbolon, menyatakan belum menerima laporan tentang Andi hingga Minggu malam, 29 Maret lalu. Pun Kapolda Lampung, Kol. Gendo Budi Santoso, menyatakan tidak tahu-menahu tentang keberadaan Andi. Bahkan, Gendo menyatakan Andi tidak termasuk dalam daftar buron Polda Lampung. "Saya tidak mengenal siapa itu Andi Arief. Tapi, kalau memang hilang, kami akan membantu mencarinya," kata Gendo seperti dikutip surat kabar *Media Indonesia* edisi 30 Maret.

Menurut siaran pers yang dikeluarkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung, siang hari, 28 Maret itu juga, Andi diculik menjelang tengah hari. Sekitar pukul 11.00 datang serombongan orang dengan mengendarai dua mobil Kijang ke ruko tempat penyewaan komputer dan alat-alat musik milik keluarga Andi. Dua orang dari dalam mobil Kijang tersebut turun dan langsung naik ke lantai dua.

Ketika ditanya oleh Sahdan, si penjaga toko, tentang keperluan kedua orang asing itu, salah satunya malah membentak. "Jangan ikut campur, kamu," demikian hardiknya. Lalu, si penghardik langsung menuju ke lantai dua, seperti sudah tahu lekuk-liku ruko tersebut. Kala itu Andi sedang menelepon. Hanya dalam beberapa detik Andi sudah dibawa ke lantai satu dan langsung dimasukkan ke salah satu mobil Kijang.

Siapa mereka? Tak jelas. Menurut penjaga ruko bernama Sahdan tadi, salah satu penangkap Andi adalah laki-laki berbadan tinggi sekitar 170 sentimeter, bertubuh gemuk, berambut cepak, dan membawa pistol.

Bilamana LBH Bandarlampung sampai membuat siaran pers. Setelah Andi dibawa



PIUS LUSTRILANANG (Depan). Hilang tak tentu rimbanya.

AMU?

Andi Arief, salah satu pimpinan SMID, "diculik" ketika menginap di rumah saudaranya. Dia orang ke-10 yang dinyatakan hilang selama Januari hingga Maret ini.

orang-orang tadi, H.M. Arief Makhya, orang tua Andi, dan Dr. Edi Irawan, kakak Andi, melaporkan penculikan tersebut ke LBH Bandarlampung. Lalu, mereka, pihak keluarga dan LBH, langsung melaporkan peristiwa itu ke Polisi Resor Kota Bandarlampung, Polisi Daerah (Polda) Lampung, dan Markas Komando Resor Militer (Makorem) 043/Garuda Hitam. Tapi, semua aparat keamanan yang dilapori mengaku tidak tahu-menahu ihwal Andi Arief. Bahkan, pihak keamanan memperingatkan agar tidak menuduh pihak keamanan dalam kasus penculikan tersebut.

Jadi, bila bukan pihak keamanan, siapa mereka? "Kalau dilihat dari ciri-cirinya, menurut cerita saksi mata, pelaku penculikan tersebut mirip petugas keamanan," kata Iberahim Bestari, S.H., Kepala Operasional LBH Bandarlampung, seperti dikutip harian *Suara Karya*, 30 Maret. Bila aparat keamanan Bandarlampung mengaku tak tahu-menahu, mungkin saja mereka datang dari luar Bandarlampung.

10 Aktivis "Hilang"

Hilangnya Andi telah menambah daftar anak-anak muda yang hilang karena aktivitasnya sebagai demonstran atau tindakan lain yang dianggap melawan pemerintah. Menurut laporan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, selama bulan Januari hingga Maret 1998 ini, sudah 10 aktivis hilang tak ketahuan rimbanya. Nasib mereka, seperti Herman Hendrawan, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga, Surabaya; Pius Lustrilanang, Ketua Aliansi Demokrasi Rakyat (Aldera); Desmon J. Mahesa, Pengacara LBH Nusantara, dan ketujuh pemuda yang lain, masih tidak jelas hingga kini.

Tapi, kalau benar mereka diambil oleh aparat keamanan, dan nanti bakal masuk pengadilan, nama mereka akan menambah deretan nama-nama mereka yang dikaitkan dengan PRD, yang sudah dijebloskan ke penjara. Misalnya Budiman Sudjatmiko, Garda Sembiring, Petrus H. Hariyanto, I Gusti Anom Astika, Yakobus Eko Kurniawan, Ken Budha, Victor da Costa, Putut Arintoko, Soeroso, D. Pranowo, Wilson Nurtiyas, Coen Husein Pontoh, dan Dita Indah Sari.

Tapi, benarkah Andi Arief masih tetap Ketua SMID, setelah induknya, yakni PRD dilarang pemerintah? Pihak keluarga Andi mengaku tidak tahu benar tentang aktivitas politik Andi di SMID dan PRD. Dan, seandainya itu benar, Arief Makhya, ayah Andi, rela anaknya diadili dan dijatuhi hukuman kalau memang terbukti bersalah.

"Tapi, saya tidak rela kalau anak saya disiksa," kata Makhya, yang anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung dan mantan Rois Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Lampung, seperti dikutip Harian *Suara Karya*.

Belum lama ini Direktur Eksekutif Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hendardi, mengimbau Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Feisal Tanjung, agar menaruh perhatian untuk mencari para aktivis yang hilang itu. Kata Hendardi di akhir pekan lalu: "Setiap warga negara Indonesia, termasuk para aktivis itu, berhak memperoleh jaminan keamanan pribadi dari negara." Dan, kalau memang mereka disangka terlibat suatu pelanggaran hukum, menahan mereka pun ada aturan hukumnya. Sudah sering dilontarkan oleh berbagai pihak bahwa Indonesia negara hukum.

Tim D&R, dari Berbagai Sumber